



BULLETIN PENDIDIKAN

EDUKASI

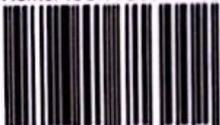
Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013

Edisi 14

PENGARUH KOMPETENSI
KEPRIBADIAN GURU TERHADAP
PEMBENTUKAN
KARAKTER SISWA DI SEKOLAH

PENDIDIKAN KARAKTER UPAYA MENGATASI KRISIS MORAL

Nomor ISSN : 2301-7139



9 772301 713002

Bulletin Edukasi

Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
Kabupaten Aceh Utara
ISSN : 2301-7139

Pengarah
Drs. H. Ibrahim Bewa, MA

**Pemimpin Umum/Penanggung
Jawab**
H.Amirullah M.Diyah, Lc. M.Ag

Pemimpin Redaksi
Hamdani, MA

Sekretaris Redaksi
Amrul syah, SE., MM

Redaktur Pelaksana
Dra. Maulidariah
Tihawa, S.Sos

Pengetikan/La
Has
Ma

Desain Grafis, Co
dan Ilustrasi
Maskur, ST

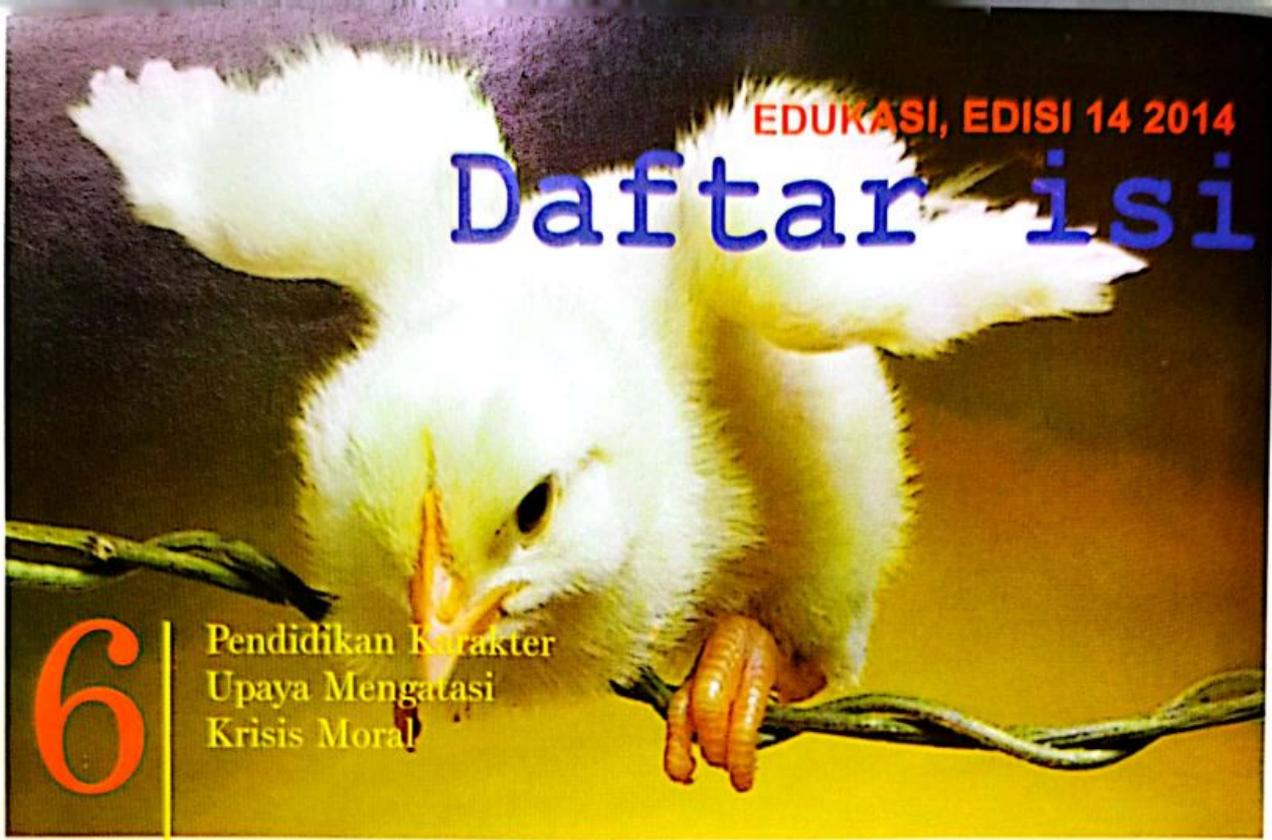
Distributor
Fadli Yahya
Maiyuriadi



Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat pada edisi ke 14 ini tim redaksi bulletin edukasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara memuat beberapa tulisan dan informasi seputar dunia pendidikan. Khusus pada edisi ini dimuat tulisan tentang sejarah dan akar rumput pendidikan dalam masyarakat Aceh, yaitu pendidikan madrasah dan dayah yang merupakan pendidikan pertama sekali yang tumbuh dan berkembang serta mencapai masa kejayaannya dalam masyarakat Aceh. Untuk memperkuat isi keilmiah tulisan tersebut, dipadukan dengan tulisan pengembangan kurikulum dayah di Aceh pada masa sekarang ini, yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 pada beberapa dayah di Aceh.

Dalam edisi ke 14 ini, juga dimuat tulisan tentang Pendidikan Karakter Upaya Mengatasi Krisis Moral yang merupakan substansi dari kurikulum nasional 2013. Setiap anak didik diharapkan tidak hanya hebat secara intelektualitas, juga harus hebat secara karakter, moral, dan akhlak. Untuk melahirkan anak didik yang berkarakter maka sangat diperlukan kepada Kompetensi Kepribadian Guru sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Oleh karena itu untuk lengkapnya edisi 14 ini, maka dimuat satu tulisan yang membahas tentang Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah.



- 12 | Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru
Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di Sekolah



- 30 | Konsep Dasar Pengembangan
Kurikulum Dayah Salafi Di Aceh



Saifuddin Dhuhi

MEMAHAMI AKAR PENDIDIKAN ACEH:

ANALISA KRITIS MODEL PENDIDIKAN DAYAH DAN MADRASAH

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu proses pembentukan, pengembangan dan pengarahan mental anak didik, baik berupa intelektualitas, karakter/emosional, spiritual bahkan keahlian hidup mereka yang sengaja didesign sesuai dengan tujuan, ideologis dan kebutuhan suatu masyarakat (Dewey, 1916). Nah, jika demikian makna pendidikan, apakah kemudian semua model pendidikan itu dianggap benar?

Menurut ahli-ahli pendidikan misalnya seperti Ibnu Khaldun (Khaldun, 1332-1406), Filosof Pendidikan Islam modern (Yunis, Ahmad, & Ibrahim, 1999), John Dewey (Dewey, 1902, 1907, 1916) dan Paulo Freire (Freire, 1972a, 1974b, 1985) menyatakan bahwa penerapan sebuah model pendidikan tidak akan benar dan berhasil, jika model pendidikan yang diterapkan tersebut tidak berakar dari

budaya, filsafat dan agama masyarakat setempat.

Sebagaimana pendapat ahli pendidikan diatas, disini saya berargumen bahwa penerapan suatu system pendidikan itu mestilah model yang telah berakar dari agama, filsafat dan budaya masyarakat setempat. Karena proses pendidikan hakikatnya adalah suatu upaya mentransfer atau pemindahan berupa pengalaman keberagamaan, pola fikir dan keberbudayaan generasi lama kepada generasi muda. Oleh karena itu, jika system pendidikan suatu masyarakat merupakan hasil impor dari masyarakat asing, maka tidak dapat dielakkan bahwa generasi muda masyarakat itu akan diajarkan pola berfikir, berbudaya dan beragama yang dimiliki masyarakat lain (Dewey, 1900, 1902, 1916, 1954).

Akibatnya, generasi muda akan terputus relasi dan ikatan mental dengan generasi tua sebagai leluhur dan endatu

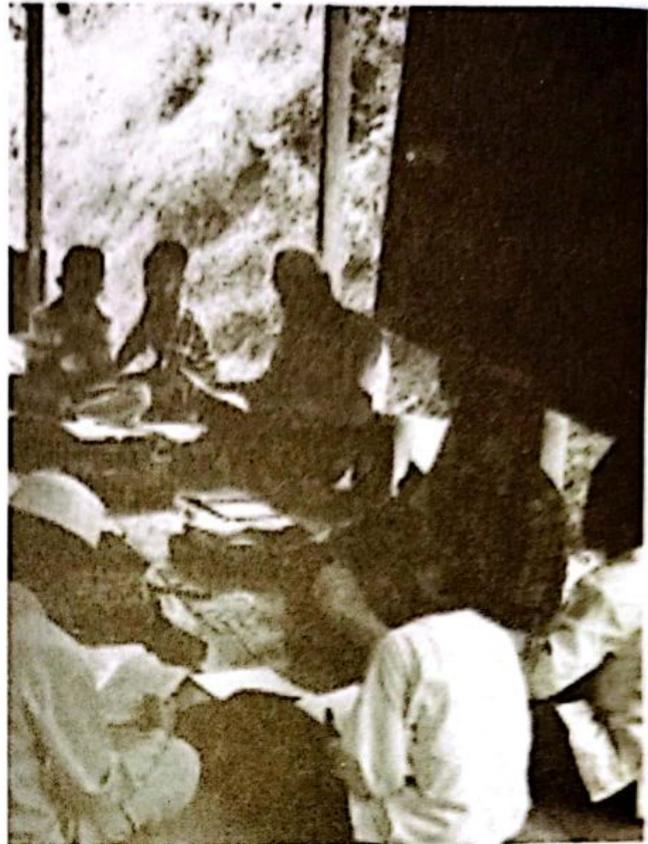
mereka. Karena pemahaman agama, cara berbudaya dan sudut pandang mereka adalah hasil rekayasa asing yang dibentuk melalui proses model pendidikan yang tidak berakar dari masyarakat itu sendiri. Untuk jangka pendek, anak-anak didik tersebut akan menjadi orang lain dihadapan generasi tua, mereka terasing dengan budaya, filsafat dan pemahaman agama generasi tua. Sementara untuk jangka panjang konflik budaya dan pandangan hidup secara otomatis akan terjadi antara generasi tua dan muda, sehingga keharmonisan masyarakat dan kohesi sosial menjadi mustahil.

Karena itu, Paulo Freire dengan lantang dan vulgar mengayau model pendidikan yang memerdekakan anak didik dari belenggu budaya, cara pandang dan agama orang lain. Dalam buku beliau; "Pedagogy of the Oppressed" dan buku "Education, the Practice of Freedom", Paulo Freire berargumen bahwa system pendidikan asing yang diterapkan dalam masyarakat lain, adalah suatu usaha penjajahan budaya (Freire, 1972b, 1974a, 1974b). Karena dengan system asing ini, masyarakat itu akan tertindas (oppressed), hilang kesadaran kolektif (False Consciousness) dan akhirnya menjadi masyarakat yang tidak beridentitas sama sekali (naïve society).

Kembali ke konteks pendidikan kita di Aceh. Hari ini, apakah model-model pendidikan yang diterapkan di Aceh merupakan akar pendidikan kita? Detilnya, apakah model pendidikan yang ada disekitar kita seperti; sekolah, madrasah, dan dayah adalah model-model pendidikan yang berakar dari agama, filsafat hidup dan budaya orang Aceh?

Membaca literatur tentang pendidikan Aceh dan Indonesia, seperti karya Amiruddin (Amiruddin, 2003, 2013), Mukhlisuddin (Ilyas, 2012), Saiful Mahdi (Mahdi, 2005), Saifuddin Duhri (Duhri, 2006, 2008), Zarnuji (Al-Zarnuji) dan Muchsin (Muchsin, 2004) jelas sekali memperlihatkan bahwa tradisi Dayah di Aceh dan terkadang secara salah dipanggil juga Pesantren ditingkat nasional merupakan akar pendidikan Aceh yang sebenarnya.

Menurut Hamdiah A Latif dalam



disertasinya di McGill (Latif, 1992) dan Tim penelitian IAIN (Sekarang UIN) Ar-Raniry (Ar-Raniary, 1978) menyatakan bahwa dayah bukan satu-satunya sistem pendidikan model Aceh, tetapi madrasah juga merupakan sistem pendidikan Aceh yang mempunyai latar sejarah erat kaitannya dengan filsafat, gaya hidup dan keberagaman masyarakat Aceh.

Namun demikian jika ditilik lebih dalam dan mendetil, ternyata karangan dan buku diatas mengalami beberapa kelemahan dalam menyajikan informasi mengenai pendidikan Dayah dan madrasah sebagai pendidikan yang lahir dari Rahim masyarakat Aceh. Buku Amiruddin memaparkan tindak tanduk Ulama Dayah dalam pergulatan sejarah konflik panjang Aceh. Buku beliau juga hasil disertasi S3-nya di universitas yang sama dengan Saudari Hamdiah, cukup representatif menjelaskan peran ulama dalam sejarah Aceh. Buku ini sangat membantu memperkaya wawasan tentang dayah, namun karena fokus pemaparan karya tersebut lebih kepada figur dayah, sehingga kurang mengena terhadap Dayah sebagai institusi pendidikan orisinal Aceh.

Disisi lain, penyajian Muhlisuddin terbaca sangat umum dan kurang menarik pada penjelasan asal dan usul lembaga dayah. Terkait dengan karya Saiful Mahdi, beliau baik sekali menrefer kepada Paulo Freire untuk mengkritisi pelaksanaan pendidikan Dayah. Tetapi analisis kritis tersebut kurang komprehensif karena tidak menghadirkan dayah dalam frame sejarah dayah yang kompleks. Demikian juga penulisan Hamdiah mengenai Madrasah. Dalam tulisan beliau terdapat gap karena tidak menghadirkan konektivitas Dayah dan Madrasah sebagai akar filosofi, budaya dan keberagaman masyarakat Aceh.

Artikel ini sengaja ditulis untuk mengisi kelemahan dan gap dalam tulisan-tulisan di atas. Disamping itu, tulisan ini juga bertujuan juga untuk menambah dan melengkapi penjelasan dari konten-konten pembahasan tentang pendidikan Aceh sebelumnya.

B. REALITAS PENDIDIKAN ACEH SEKARANG

Sekarang di Aceh ada empat model pendidikan. Keempat model tersebut dapat dibagikan kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah model pendidikan non-integrasi kurikulum. Pertama; sekolah umum yang mengandung sekitar 5 % kurikulum agama, sedangkan kelompok kedua yaitu; Dayah Salafi yang mengajari kira-kira 95 % kurikulum agama, 5 persen sisanya diisi pelajaran umum. Pendidikan seperti ini dilakukan di Dayah Abuya Mudawali dan jaringannya, dayah jaringan Aziziyah dan dayah Tanoh Abee.

Adapun kelompok ketiga dan keempat adalah kelompok pendidikan integrasi pelajaran umum dan agama, yaitu; madrasah yang terdiri dari 25-30 % kurikulum agama, 70-75 kurikulum umum dan Dayah Modern/Terpadu yang terdiri kira-kira 50% kurikulum agama (kurikulum Dayah salafi dipadukan dengan Madrasah atau Sekolah) dan 50% kurikulum umum.

Tarik Menarik Antara Sistem Madrasah dan Sistem Dayah

Kalau ditelusuri secara kualitatif, akar-

akar untuk mempertahankan pendidikan non-integrasi sangat kuat dan mendominasi masyarakat bawah (grass root); masyarakat yang berekonomi rendah, pedalaman dan dispora dayah-dayah salafi. Sementara akar pemahaman integrasi pendidikan banyak terjadi di kalangan perkotaan, akademisi, tokoh-tokoh pendidikan modern, biokrat dan gerakan pembaharuan pemahaman Islam.

Umumnya para pendukung non-integrasi pendidikan Aceh beranggapan bahwa pendidikan dikhotomi adalah ketentuan agama, petuah ulama-ulama pendahulu mereka. Menentang atau melakukan sesuatu diluar koridor perlakuan ulama sebelum mereka adalah teumereuka (kualat). Kepercayaan seperti ini terpupuk dan dipelihara dengan baik dilingkungan dayah-dayah Salafi seluruh Aceh.

Diantara alasan-alasan mendasar yang menolak integrasi pendidikan adalah: "Jika disatukan pendidikan umum dan agama dalam satu institusi maka beban kurikulum bagi anak didik sangat berat dan itu menyebabkan anak didik tidak akan menjadi seorang yang profesional dalam keilmuannya. Walhasil, maka pengajaran agama harus pelajaran agama murni seperti kurikulum Abuya Mudawali, dan pendidikan umum, harus umum saja agar profesional penguasaan suatu bidang keilmuan terjadi dengan sempurna".

Alasan lainnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Ruslan: Menggabungkan ilmu umum dengan ilmu agama maka akan hilang berkah ilmu agama, dan hilang berkah Abuya Mudawali (interview dengan Abu Ruslan, Pemimpin dayah Darussalam, Blang Paroh, Aceh Selatan, 20 February 2007). Sementara menurut pendapat Walid Hasanun: "untuk mewujudkan ulama yang profesional, maka ilmu agama harus tetap murni tanpa dicampur aduk dengan ilmu umum, kecuali pada tingkat pendidikan Tinggi" (Interview dengan Walid Hasanun, Pemimpin Dayah Aziziyah Samalanga, Agustus 2005).

Namun kalau ditelusuri lebih mendalam, maka alasan-alasan mereka sebenarnya mendasar pada sejarah

kegemilauan dayah pada masa Abuya Mudawali yang seperti kita ungkapkan di atas. Mereka para murid-muridnya tidak berani memperbaharui konsep-konsep pendidikan yang diperkenalkan oleh guru mereka, hal inilah yang menyebabkan mereka selalu bertahan dengan non-integrasi pendidikan. Meskipun pendidikan yang dilakukan oleh Abuya Mudawaly itu hasil dari rekayasa penjajahan Belanda sebelum beliau, bertujuan melenyapkan semangat jihad melawan penjajahan Belanda itu sendiri.

Selain karena mempertahankan jejak Abuya Mudawali dengan alasan keberkatan, keuramat dan lain-lain, mereka juga berargumen berdasarkan al-Quran dan Hadist-hadist. Diantara penafsiran ayat Al-Quran yang paling sering didengar adalah: penafsiran kata ulama dalam ayat al-Quran Surah Fatir 28:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Penafsiran kata ilmu dalam ayat al-Qur'an Surah Almujaadalah: 11.

وَإِذَا قِيلَ اُنشُرُوا فَاُنشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Kata ulama disini ditafsirkan sebagai alumni-alumni dayah salafi yang belajar langsung kitab-kitab kuning, sementara alumni pendidikan Islam modern seperti madrasah dan pendidikan tinggi Islam tidak dianggap sebagai ulama.

Demikian juga pemahaman ilmu di ayat tadi hanyalah terbatas kepada ilmu-ilmu diajarkan di dayah salafi yang murni ilmu agama tanpa bercampur umum. Sehingga bagi masyarakat dayah terkesan ilmu umum adalah ilmu bukan agama, yang jelas jauh dari keridhaan Allah dan kebahagiaan di akhirat, maka mempelajari ilmu tersebut kurang mendapat penghargaan yang memadai. Bahkan bagi yang mempalajari ilmu agama dari buku

(pelajaran agama ditulis dalam bahasa latin) dianggap tidak layak disebut sebagai ulama, sehingga ulama buku dinomor duakan. Hadist-hadist seperti:

العلماء ورثة الانبياء , يحبهم أهل السماء
وتستغفر لهم الحيتان في البحر اذا ماتوا
الى يوم القيامة

Juga dipahami dengan pengertian yang sama seperti di atas.

Selain penafsiran tadi yang keliru, mungkin lebih layak disebut penakwilan, pemahaman tugas ulama juga menjadi alasan kenapa ulama itu harus ahli hanya dalam bidang kedisiplinan ilmu agama saja. Dalam kalangan dayah, ada tiga macam kewajiban yang dibebankan kepada tiap kelompok manusia muslim. Pertama kewajiban untuk memaksa masyarakat menjalankan ajaran agama sebagai tanggung jawab pemerintah, kedua kewajiban menyampaikan secara lisan melalui ceramah, khutbah-khutbah pada hari besar agama dan mengajari agama di dayah-dayah adalah tanggung-jawab ulama-ulama dan terakhir, masyarakat umum berkewajiban untuk belajar agama dan menjalankan agama, dipaksa oleh negara dengan kekuasaan dan diajarkan oleh ulama di dayah-dayah dengan lisan.

Dasar-dasar pemahaman ini didapatkan dari ayat al Quran surah Ali imrarn 20:

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Hadist Nabi Saw:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَوْعَفُّ الْإِيمَانِ

Atas dasar pemahaman itu, maka bagi masyarakat dayah ulama yang menyibukkan diri dengan kekuasaan dianggap salah kaprah, menyimpang dari aturan agama dan terkesan negatif, mari

kita lihat gambaran pepatah Aceh ini:

Ulama jameun pijeut-pijeut karena seumeubeut dan meutapa,

ulama jinoe teumbon-teumbon karena eik troen reunyeun raja.

Artinya: "Ulama dahulu kurus-kurus karena sibuk dengan mengajar ngaji dan bertapa,

Ulama sekarang gemuk-gemuk, karena sibuk naik turun tangga (mengurus kekuasaan) raja".

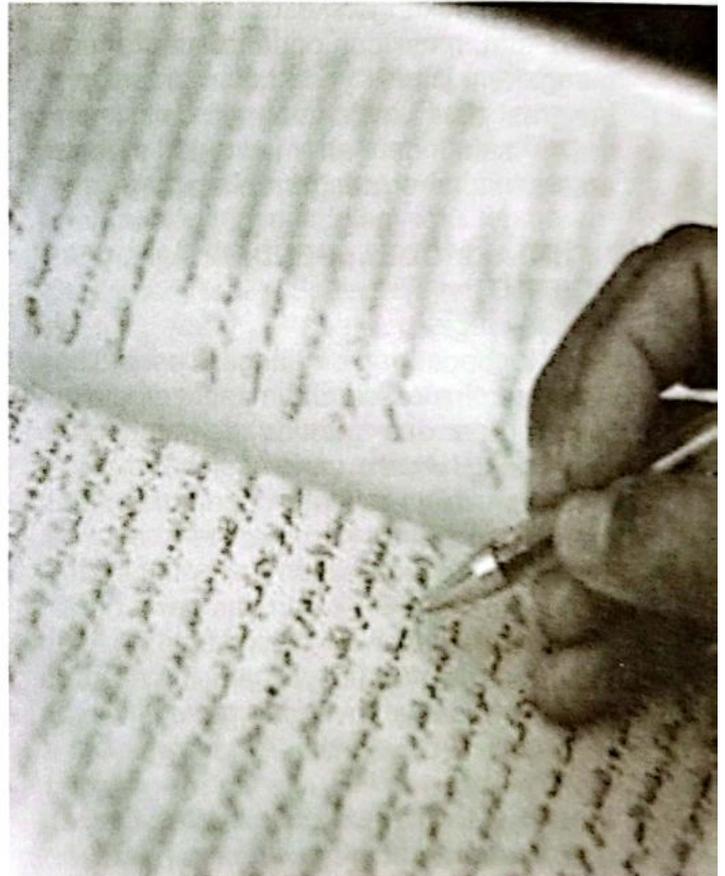
Meskipun harus diakui pemahaman terakhir ini sudah mulai memudar sejak ulama-ulama mulai melibatkan diri kedalam politik secara pasif di tingkat pemerintahan kabupaten dan kota atau bahkan provinsi. Penulis masih teringat hadist maudhu' yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje tentang tercelanya ulama menyibukkan diri dengan ke-kuasaan dalam rangka menjatuhkan pengaruh ulama dayah untuk melawan penjajahan Belanda dalam sejarah Aceh, bunyi hadist ini kira-kira; Addunya jiffah, faman thalabaha fahuwa kalbun, artinya: "dunia ini adalah bangkai, maka barangsiapa mencoba menguasainya maka ia adalah anjing pemakan bangkai".

Adapun alasan-alasan yang mendasari pemikiran integrasi pendidikan atau yang disebut dengan non-dikhotomi pendidikan adalah alasan yang tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan mereka yang kontra-integrasi pendidikan; sejarah, pemahaman al-Quran dan Hadist dan tuntutan perkembangan zaman.

Rasanya sudah cukup kita jelaskan di atas bagaimana utopia (ideal) kemajuan kerajaan Aceh Darussalam menjadi inspirasi bagi tokoh pendidikan, bahwa kemajuan yang dialami pendahulu mereka adalah karena kemajuan pendidikan yang berbentuk dayah dengan sistem integrasi kurikulum agama dan umum. Maka untuk membangun kembali kemajuan itu diperlukan secara primer pembangunan pendidikan atas dasar pilar sejarah pendidikan dayah Baiturahman. Dengan kata lainnya suatu bangsa tanpa masa lalu adalah suatu bangsa tanpa masa depan, karena masa lalu adalah impian indah yang mesti diwujudkan kedepan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, namun tetap dengan essensi yang sama.

Apalagi dengan gerakan pembaharuan pendidikan yang dipengaruhi angin PAN-Islam melalui gerakan PUSA mendapat kecocokan dengan landasan sejarah awal mula sejarah kemajuan Aceh di masa kerajaan. Perjuangan PUSA-lah yang meletakkan dasar adanya madrasah-madrasah di Aceh sebagai pendidikan intergrasi anti thesis dari sekolah dan dayah salafi tradisional. Meskipun kemudian Madrasah berevolusi menjadi dayah modern yang dianggap lebih orisinil pendidikan integrasi.

Alasan-alasan primer lain adalah lebih cenderung kepada pemahaman agama



Islam secara universal, seperti: Agama Islam adalah agama universal, maka tidak logika jika ajarannya hanya mencakup urusan ibadah atau apa yang disebut dengan hubungan Tuhan dengan manusia saja. Maka Ruang lingkup ajaran Islam mencakupi dunia-akhirat, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, Alam. Jadi niscayanya pendidikan Islam intergrated mencakup segala lini kehidupan manusia (Interview dengan Bapak Karimun, S.Pd, M.Ag. kepala

Madrasah Tsanawiyah I, Lhokseumawe, July 2007).

Demikian juga menjadi mustahil memahami Islam hanya dengan memahami ilmu-ilmu agama saja atau sebaliknya dengan ilmu-ilmu umum saja karena memisahkan pendidikan umum dan agama adalah pemikiran sekuler; pendidikan umum saja tanpa materi agama adalah sekuler aktif, sedangkan pendidikan agama tanpa pelajaran umum adalah sekuler pasif.

Karena pemikiran integrasi ini didominasi oleh masyarakat kota, para cendekiawan dan intelektual kampus maka secara otomatis pemikiran integrasi mendapat dukungan kekuasaan dan politik yang kuat, meskipun pada tataran tertentu mengalami konflik yang tajam antara pro-integrasi dan kontra-integrasi baik antara dayah salafi dengan madrasah maupun antara madrasah dengan sekolah.

C. DUA MODEL PENDIDIKAN AKAR RUMPUT

Membaca perkembangan pendidikan Aceh, secara keseluruhan dapat dipetakan bahwa ada dua periode perkembangan pendidikan Aceh yang selalu menjadi inspirasi dan rujukan pengembangan pendidikan Dayah dan madrasah saat ini. Dua periode keemasan tersebut adalah Periode dayah Bai-turahman yang berdiri di masa keemasan kejayaan kerajaan Aceh Darussalam, khususnya pada masa Raja Iskandar Muda, dan kedua periode Dayah Darussalam, Dayah Abuya Mudawali.

Model Madrasah: Periode Dayah Baiturrahman

Bagi anda dan siapa saja sudah tidak asing lagi mendengar Baiturrahman. Namun siapa yang menduga bahwa ternyata masjid Baiturrahman yang megah berdiri ditengah kota Banda Aceh, dalam sejarahnya adalah sebuah dayah manyang yang selalu menjadi kiblat semua pendidikan dayah saat itu. Agar dapat memahami dengan baik model pertama ini, nanti akan disebutkan sebagai model madrasah, maka diperlukan pelacakan perkembangan dayah ini dari awal

perkembangannya.

Awal mula berkembangannya Dayah Manyang Baiturrahman dapat ditelusuri mulai sejak berdirinya Dayah Cot Kala. Dayah ini dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Asia Tenggara. Didirikan pada abad 10 M pada permulaan berdirinya kerajaan Peureulak, dayah ini berperan dengan baik sekali mengembangkan dan menyebarkan Islam ke seluruh Asia Tenggara, dan sekaligus sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan lokal (Iskandar, 2007). Menurut Ali Hasjimy (Hasjmy, 1978b), latar-belakang sejarah lahirnya dayah Cot Kala dan lainnya adalah diawali dengan datangnya da'i-da'i dari dunia muslim terutama dari Arab, Persia dan Gujarat guna untuk menyebarkan Islam di Aceh. Hal ini sebagaimana yang beliau katakan dalam bukunya:

Menurut catatan Syeikh Ishak Makarani Al Pasy dalam kitabnya Idharul Haq, bahwa dalam tahun 173 H. (800 M) telah berangkat dari teluk Kambey (Gujarat) sebuah kapal Angkatan Dakwah dibawah pimpinan Nakhoda Khalifah menuju Bandar Perlak di pantai Utara pulau Sumatera dan dalam tahun itu juga mendarat disana.

Angkatan dakwah dibawah pimpinan Nakhoda Khalifah tersebut berjumlah sekitar 100 orang yang terdiri dari orang-orang Arab diantaranya suku Quraish, orang-orang Persia dan orang-orang Gujarat.

Pada waktu itu di Perlak telah lama berdiri berbagai kerajaan Hindu-Budha dan sebagian besar penduduknya beragama Hindu, Budha dan sebagian lain masih menganut kepercayaan animisme (perbegu). Angkatan Dakwah Nakhoda Khalifah yang mempunyai pengetahuan luas dalam berbagai bidang ilmu, pada mulanya mereka mengajar kepada rakyat Perlak cara-cara bertani yang baik, cara-cara berdagang yang berhasil, cara-cara bertukang yang mengutungkan, cara-cara berumah tangga yang bahagia dan lain-lain sebagainya. Sementara kepada para penguasa diberi tuntunan cara memerintah yang dapat membahagiakan rakyat.

Setelah semua ajaran ini dinikmati oleh mereka dan dirasa ada manfaatnya barulah dijelaskan bahwa itu semua adalah ajaran

agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Sehingga dengan suka rela para penguasa dan rakyat Perlak serentak meninggalkan agama lama mereka dan menganut agama Islam.

Setelah terbentuk kerjaan Islam Perlak, maka usaha yang dilaksanakannya yaitu mendirikan tempat-tempat pendidikan bagi putra-putri negara yang baru itu, dimana untuk mengajari didatangkan guru-guru dari Arab, Persia dan Gujarat.

Para Sultan yang memerintah kerajaan Islam Perlak terdiri dari ulama-ulama yang mempunyai pengetahuan luas dan karena itu mereka sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Setelah berdiri banyak tempat-tempat pendidikan yang bernama Zawiyah dalam kerajaan Perlak, maka pada akhir abad ketiga hijriyah (awal abad ke 10 masehi) didirikanlah pusat pendidikan Islam yang bernama Zawiyah Cot Kala oleh seorang pangeran yang berulama Muhammad

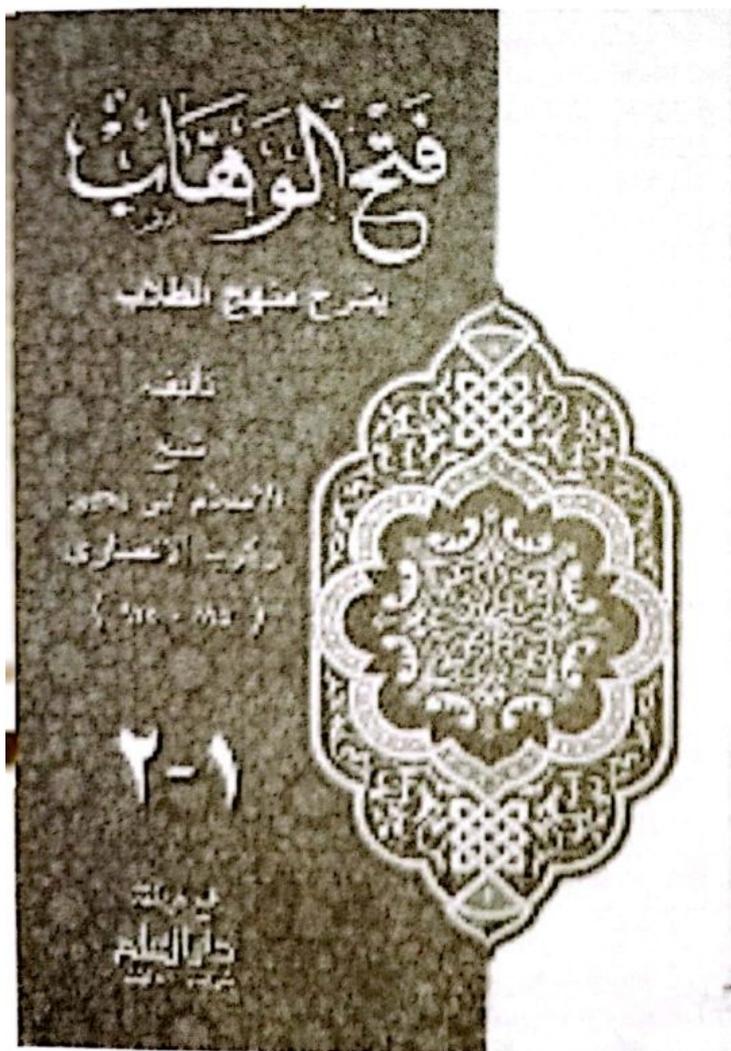
Amin, namanya yang kemudian lebih terkenal dengan lakap Tengku Chiek Cot Kala sebagai rektor dari perguruan tinggi tersebut. Kata-kata "zawiyah" lambat laun berubah sebutan menjadi "dayah" (Ali Hasjmi 1978, hal: 60).

Puncak perkembangan dayah-dayah di Aceh adalah dengan berdirinya Dayah Aaly atau universitas, salah satu temama adalah universitas Baiturrahman. Menurut Ali Hasjimi para guru besar untuk mengajar di Jamiah Baiturrahman selain ulama atau sarjana Aceh sendiri juga didatangkan dari Arab, Turkey, Persia dan India (Ali Hasjmi 1978, 62-65). Sehingga menjadikan universitas ini sebagai lembaga pendidikan bertaraf international dalam dunia Islam.

Ciri khas pendidikan pada periode ini adalah intergrasi pendidikan umum dengan agama. Saat itu belum dikenal pemisahan pelajaran umum dan pelajaran agama, keduanya adalah satu kesatuan ilmu pengetahuan yang bersumber dari al Quran dan Hadist. Seperti Dayah Cot Kala (10 M) yang dikenal sebagai dayah pertama di Asia Tenggara (lembaga pendidikan Islam tertua di Asia Tenggara), di sini diajarkan pelajaran agama dan pelajaran umum sekaligus, itu dikarenakan pada waktu itu, dayah Cot Kala adalah satu-satunya pendidikan yang ada dalam masyarakat Aceh (Ali Hasjmi 1978).

Apalagi ketika peran dayah Cot Kala sudah mulai terlibat dalam pemenuhan kepentingan Kerajaan Peureulak, fungsinya berubah menjadi lebih besar dan mencakup ilmu-ilmu umum dan agama serta keahlian praktis. Seperti yang dituliskan oleh Ali Hasyimi, "Dalam dayah semua pelajaran diajar dalam bahasa Arab, dengan mempergunakan kitab-kitab bahasa Arab. Ilmu-ilmu yang diajarkan antara lain: fiqh muamalat, tauhid, tassawuf/akhlak, geografi (ilmu bumi), sejarah, ilmu tata negara dan bahasa Arab" (Ali Hasjmy 1978, hal: 60).

Setelah berdiri dayah-dayah teungku Chiek diberbagai tempat dalam kerajaan Aceh Darussalam, maka di ibu kota negara Banda Aceh didirikan pula Jamiah Baiturrahman (Universitas Baiturrahman) yang menjadi satu kesatuan dengan



Masjid Jami' Baiturrahman. Jamiah Baiturrahman mempunyai bermacam-macam "daar" (kalau sekarang kira-kira fakultas), seperti daaru tafsir wal hadist (fakultas ilmu tafsir/hadis), daaru thib walkimia (fakultas kedokteran dan kimia), daaru tarikh (fakultas sejarah), daaru siyasah (fakultas sosial politik), daaru falsafah (fakultas filsafat) dan lain-lainnya.

Adapun para guru besar untuk mengajar dijamiah Baiturrahman selain ulama/sarjana Aceh sendiri juga didatangkan dari Arab, Turki, Persia dan India. Para guru besar jamiah Baiturrahman pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Iskandar Muda Darma Wangsa Perkasa Alam Syah (1016-1045 H/1607-1636 M) terdapat sebagai berikut (Hasjmy, 1978a):

1. Seri Faqih Zainul Abidin Ibnu Daim Mansur Abdullah Malikul Amin Syah
2. Syeikh Nuruddin Muhammad Jailany Ibnu Ali Arraniry.
3. Syeikh Kamaluddin bin Yusuf.
4. Syeikh Aliuddin bin Ahmad.
5. Syeikh Muhjiddin Bin Ali
6. Syeikh Taqiuddin bin Hassan.
7. Syeikh Saifuddin Abdul Qahhaar
8. Syeikh Syamsuddin bin Musa
9. Syeikh Abdul Halim bin Yatim.
10. Syeikh Abdul Muin bin Ja'far.
11. Syeikh Abdul Fatah Al Amin.
12. Syeikh Abdussamad bin Majid
13. Syeikh Ali Bin Hakim
14. Syeikh Abdullah bin Mustafa.
15. Syeikh Abu Syu'ib bin Ayyub.
16. Syeikh Said bin Yahya.
17. dan lain-lain.

Demikianlah keadaan pendidikan dan pengajaran Islam masa kerajaan Aceh Darussalam, dimana ternyata telah mencapai tahap kemajuan yang dihayati sesuai dengan ukuran zamannya. Pada waktu itu Dayah Baiturrahman adalah dayah yang paling terkemuka. Dayah ini memiliki kelengkapan kurikulum yang menyerupai universitas sekarang, karena kurikulumnya lengkap dengan materi-materi agama dan materi umum. Materi-materi ini disatukan dalam bentuk fakultas atau daar, semuanya ada 17 daar (Majid, July, 14, 2006), yaitu:

- 1) Daar al-Tafsir wal Hadis (Interpretation and Hadist Faculty);
- 2) Daar al-Thib (Medical Faculty);

- 3) Daar al-Kimiya (Alchemy Faculty);
- 4) Daar al-Taarikh (History Faculty);
- 5) Daar al-Hisaab (Mathematics Faculty);
- 6) Daar al-Siyasah (Politics Faculty);
- 7) Daar al-Aqli (Faculty Ilmu Logics);
- 8) Daar al-Ziraah (Faculty Pertanian);
- 9) Daar al-Ahkaam (Faculty of Law);
- 10) Daar al-Falsafah (Faculty Philosophy);
- 11) Daar al-Kalam (Faculty Theology);
- 12) Daar al-Wizaarah (Fakultas Ilmu Pemerintahan);
- 13) Daar al-Khazanah Bait al-Maal (Fakultas Keuangan/Akuntansi Negara);
- 14) Daar al-Ardh (Fakultas Pertambangan);
- 15) Daar al-Nahwu (Fakultas Sastra Arab);
- 16) Daar al-Mazahib (Fakultas Perbandingan Mazhab); dan
- 17) Daar al-Harb (Fakultas Ilmu Militer)

Berdasarkan uraian di atas, saat itu dayah meningkat ke masa keemasannya karena dua alasan, pertama tingkatan pendidikan dayah meliputi semua tingkat pendidikan masa modern sekarang; tingkat dasar, menengah dan tingkat universitas. Alasan kedua karena kurikulum dan cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan telah meliputi seluruh pengetahuan yang diperlukan saat itu sebagaimana pada daar-daar atau fakultas-fakultas yang tersedia pada dayah manyang Baiturrahman.

Setelah masa dayah Baiturrahman, perkembangan dayah menjadi redup dan menurun akibat terjadinya perang antara kerajaan Aceh, ulama dan masyarakat Aceh dengan bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda. Perang ini memberi pengaruh negatif terhadap kurikulum dayah dan memaksa dayah beradaptasi dengan keadaan. Sebagaimana digambarkan Hamdiah Latif (Latif, 1992) tentang ciri khas pendidikan madrasah mengintegrasikan pelajaran umum dan agama, maka periode dayah Cot Kala dan Baiturrahmah ini memiliki ciri khas tadi, maka akan disebutkan sebagai model madrasah.

Model Dayah Salafi: Periode Dayah Darussalam Labuhan Haji

Adapun periode kedua adalah sekitar

paruh akhir abad 19-20 M. Yang menjadi dasar anggapan pendidikan model kedua ini bahwa pendidikan di Aceh adalah memisahkan pendidikan umum dan agama (non-integrasi). Periode ini lahir dilatar belakangi oleh pengaruh penjajahan Belanda dalam menghambat perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan mereka. Menyadari bahwa jihad yang dilakukan oleh rakyat Aceh adalah bersumberkan dari semangat ajaran agama yang diajarkan secara intensif di tiap-tiap pendidikan dayah saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda melalui rekomendasi Snouck Hurgronje merasa perlu untuk ikut campur terhadap substansi kurikulum dayah.

Dimaklumi di Aceh, semangat perlawanan menentang penjajahan yang saat itu adalah orang Eropa sudah tertanam dengan kuat sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh dan terus berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Semangat perjuangan menentang penjajahan diturunkan dari generasi ke generasi dalam kurikulum-kurikulum dayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa; rahasia perjuangan rakyat Aceh adalah berada pada pendidikan dayah, maka untuk melumpuhkan perjuangan masyarakat Aceh diperlukan secara mutlak untuk melumpuhkan pendidikan dayah itu sendiri.

Maka untuk merealisasikan tujuan tersebut Belanda mengeluarkan peraturan tentang pembatasan ruang gerak dayah dan ulama dalam staadblaad 550 tahun 1915 (Abuddin Nata 2001). Target peraturan tersebut adalah untuk melemahkan perlawanan para ulama dan muridnya terhadap penjajahan Belanda, disamping juga bertujuan untuk memperlumah kekuasaan ulama dalam masyarakat sehingga akan memperkuat pengaruh ulei balang sebagai kaki tangan penjajah. Sejak itu kurikulum dayah hanya terbatas pada pendidikan agama yang berkuat pada Fiqh mazhab Syafi'i, Aqidah Asya'ariyah dan tassawuf sunni, seperti Haddadiyah, Naqsyabandiyah, Samadiyah, Syatariah dan lain-lainnya (Duhri, Saifuddin 2001).

Para ulama Aceh kala itu terbagi kepada pro dan kontra terhadap kebijakan penjajahan Belanda tersebut. Namun pada

hakikatnya mereka tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima tekanan itu untuk tetap menjaga masyarakat agar tetap terdidik, meskipun dalam ruang-lingkup pendidikan agama yang sempit. Selain alasan demi terjaga kelangsungan pendidikan agama, aturan Belanda itu diterima juga karena akan memungkinkan terjadi pergantian para ulama-ulama dan pimpinan dayah yang banyak syahid dalam pertempuran-pertempuran melawan penjajah. Namun lama kelamaan sistem non integrasi pendidikan menjadi semakin mantap dan terlestarikan oleh sebagian ulama Aceh saat itu.

Pemisahan pendidikan umum dari pendidikan agama mencapai puncak dukungan dari kalangan ulama Aceh adalah pada masa Abuya Mudawaly. Kehadiran beliau dalam dunia pendidikan Aceh melalui dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan semakin memperkuat posisi non-integrasi pendidikan. Selain keberhasilan beliau menyempurnakan kurikulum pendidikan dayah dengan menambah ilmu-ilmu alat . Beliau berhasil mendidik ulama-ulama putera Aceh yang brilian dan berpengaruh tinggi yang kemudian tersebar keseluruh Aceh .

Keadaan bertambah menguntungkan lagi karena masa itu Aceh sedang bergejolak pemberontakan melawan Jakarta oleh gerakan PUSA dalam peran DI-TII, maka lembaga pendidikan satu-satunya yang aman untuk belajar bagi masyarakat Aceh adalah Dayah Abuya Mudawali. Keuntungan itu terjadi karena dua alasan: pertama karena beliau dan dayahnya kontra terhadap PUSA, kedua konsekuensinya beliau juga anti terhadap gerakan DI-TII yang berakibat dayah beliau mendapat dukungan dari Jakarta dalam menjalankan pendidikannya yang non-integrasi.

Sistem pendidikan non-integrasi semakin dominan di Aceh setelah pengaruh pembaharuan pendidikan Islam modern (madrasah-madrasah) yang dipelapori oleh PUSA menjadi surut disebabkan keterlibatan PUSA membeberontak melawan pemerintah pusat Indonesia untuk mendirikan negara Islam. Keberhasilah pemerintah pusat mem-



berantas pejuang DI/TII sekaligus mengakibatkan surut perkembangan madrasah karena banyak tokoh-tokoh penjuang DI/TII itu sendiri adalah pelaksana pendidikan madrasah.

Setelah perang berakhir, pemuka-pemuka PUSA dan ulama kharismatik; Abu Beureueh, Abu Krueng Kalee, Abu Ujoeng Rimba dan lainnya terus berusaha untuk melanjutkan pendidikan sistem integrasi seperti yang tertuang dalam keputusan perjanjian Lamteh yaitu merubah pendidikan dayah (non-integrasi) ke pendidikan madrasah (integrasi) termaktub dalam beberapa butir ikrar Lamteh, Aceh Besar.

Namun demikian, waktu itu, pemisahan yang melebar antara kelompok-kelompok ulama-ulama Aceh yang pro-integrasi pendidikan (madrasah) yang terdiri dari Ulama PUSA dan ulama non-integrasi pendidikan (dayah-dayah salafi) yang terdiri dari ulama-ulama PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) tetap berlangsung. Bahkan antara mereka sering berimbas kepada konflik pemahaman agama yang layaknya terjadi antara NU dan

Muhammadiyah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa perlu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan filsafat, agama dan budaya suatu masyarakat. Dalam konteks Aceh, dayah dan madrasah merupakan dua sistem pendidikan yang memiliki akar rumput yang kuat dalam sejarah perkembangan pendidikan Aceh sejak masa Kesultanan Pasee.

Dalam perkembangan dayah yang panjang, sistem dayah dapat dibagikan dua model, berdasarkan analisa muatan kurikulum; yaitu madrasah dan dayah salafi. Madrasah berakar kepada model kurikulum Dayah Cot Kala dan Baiturrahman, sementara dayah salafi dibangun atas konsep pendidikan dayah jaringan Abuya Mudawali.

Saat ini dua model ini saling tarik menarik atau antara integrasi dan non integrasi saling bersaing. Berdasarkan analisis penulis, kedepan sistem madrasah dan dayah salafi akan semakin mundur,

karena sistem integrasi model madrasah dianggap kurang relevan sebagai sistem non-intergasi dayah. Model pendidikan sintesai antara dayah dan madrasah akan menjadi prospektif pendidikan Aceh masa depan.

REFERENSI

Al-Zamuji, S. *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*. Surabaya: Al-Hidayah.

Amiruddin, H. (2003). *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadia Fondation.

Amiruddin, H. (2013). *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena.

Ar-Raniary, I. J. a. (1978). *Laporan Penelitian: Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey.

Dewey, J. (1900). *The school and society*. Chicago: University of Chicago Press.

Dewey, J. (1902). *The Child and the Curriculum*. Chicago: University of Chicago Press.

Dewey, J. (1907). *The school and society : being three lectures*. Chicago: The University of Chicago Press.

Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education*. New York: Free Press.

Dewey, J. (1954). *The public and its problems* ([3rd ed.]). Denver: Swallow.

Duhri, S. (2006). *Dayah dalam Tiga Phase Perkembangan*. Sarwah, IX(STAIN Malikussaleh), 151-167.

Duhri, S. (2008). *Pendidikan Islam Traditional Aceh: Sejarah Perkembangan Dayah Generasi Baru* Peneliti Muslim Indonesia, Mencari Ilmu di Australia, Kumpulan Makalah Dosen Penguruan Tinggi Islam Indonesia Peserta Program PERTII 2004-2006. Kingston, Australia: Australia-Indonesia Institute.

Freire, P. (1972a). *Cultural action for freedom*. Harmondsworth,: Penguin.

Freire, P. (1972b). *Pedagogy of the oppressed*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin.

Freire, P. (1974a). *Education for critical*

consciousness. London: Sheed and Ward.

Freire, P. (1974b). *Education, the practice of freedom*. London: Writers and Readers Publishing Cooperative.

Freire, P. (1985). *The politics of education : culture, power and liberation*. London: Macmillan.

Hasjmy, A. (1978a). *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*. Jakarta: Cv. Bulan Bintang.

Hasjmy, A. (1978b). *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh; the Potpourri from the Land of Aceh*. Jakarta: Cv. Bulan Bintang.

Ilyas, M. (2012). *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas*. Yogyakarta: Pale Indonesia Media.

Iskandar, T. (2007). *Aceh as a Muslim-Malay Cultural Centre (14th-19th Century)*. Paper presented at the International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, Banda Aceh. http://www.ari.nus.edu.sg/docs%5CAceh-project%5Cfull-papers%5Caceh_fp_teukuiskandar.pdf

Khaldun, A. i. M. I. (1332-1406). *Muqaddimah Ibn Khaldun; the Ibn Khaldun's Introduction* (Vol. 1). Beirut: Daarul Jail.

Latif, H. A. (1992). *Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) : its contributions to educational reforms in Aceh*. from University Microfilms International (drukker) http://www.acehbooks.org/pdf/ACEH_03332.pdf

Mahdi, S. (2005). *Dayah Freire: Revitalisas Pendidikan Aceh*. Seumike, 1.

Majid, M. S. A. (July, 14, 2006). *Mengembalikan Ruh dan Citra Pendidikan Aceh*. from Acehisntitute www.Acehisntitute.org

Muchsin, M. A. (2004). *Tengku Syeikh MudaWaly al-Khalidy: Bapak Ulama Dayah dan Penentang DI/TII* Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh. Banda Aceh: Ar-raniry Press.

Yunis, F. A., Ahmad, M. A., & Ibrahim, M. A. (1999). *Al-Tarbiyah Al-Diniyah Al-Islamiyah Baina Al-Ashlah wa al-Muashir*. Cairo: Darul al-Alamu al-Ilmi.



MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
(DEWAN PENDIDIKAN)
KABUPATEN ACEH UTARA
Jalan Samudra No. 18 Lhokseumawe Prov. Aceh